

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Nordic atau *Norden* yang secara harafiah memiliki arti yaitu utara, merupakan wilayah geografis yang terletak di bagian utara Eropa dan Atlantik Utara. Negara-negara yang tergabung dalam wilayah ini antara lain Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Åland (Kronvall, 2022). Negara-negara ini memiliki beberapa kesamaan dalam cara hidup, sejarah, agama serta struktur sosial yang dimiliki. Walaupun terdapat kesamaan sejarah yang panjang dalam aspek politik, tetapi negara-negara tersebut tidak memiliki suatu entitas tunggal yang mencakupnya. Terdapat suatu gerakan bernama "*The Scandinavian Movement*" yang berusaha untuk menyatukan Denmark, Norwegia dan Swedia untuk menjadi suatu kesatuan pada abad ke-19. Gerakan ini berkembang menjadi sebuah bentuk kerjasama yang terorganisir secara modern setelah kemerdekaan negara-negara seperti Norwegia, Finlandia serta Islandia. Pada tahun 1962, terdapat perjanjian yang mendasari kerjasama antar negara-negara di kawasan Nordik yaitu Perjanjian Helsinki. Dalam perjanjian ini terdapat penetapan kerangka kerja untuk Dewan Nordik dan Dewan Menteri Nordik. Walaupun terdapat kesamaan di antara negara-negara Nordik, tetapi setiap negara tetap memiliki model ekonomi dan sosialnya masing-masing (Munch Haagensen, 2013).

Ekonomi negara Nordik termasuk dalam negara terkaya di dunia. Penduduk negara tersebut juga memiliki standar hidup yang tinggi karena kesenjangan upah yang relatif kecil, pekerjaan serta pajak yang tinggi. Selain itu, terdapat jaminan sosial dan pendidikan yang menunjang serta mudah diakses. Menurut perspektif makroregional, negara-negara Nordik ini memiliki kawasan yang koheren dan berkinerja baik bahkan di atas rata-rata yang dimiliki UE dan OECD. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki, seperti: Swedia yang menjadi negara dengan PDB tertinggi. Akan tetapi di samping itu, Norwegia menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi yaitu sebesar 82.2 miliar US dollar. Sementara itu, kelima negara Nordik juga masuk ke dalam 20 negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia (Statista Research Department, 2022). Sebagai negara-negara yang masuk ke dalam 20 negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, negara-negara Nordik sering memberikan bantuan pembangunan luar negeri kepada negara miskin dan berkembang sehingga mereka mendapatkan reputasi atas kemurahan hati mereka, terlebih dalam aspek hak asasi manusia dan demokrasi. Norwegia, Denmark dan Swedia menjadi negara yang memenuhi target PBB untuk memberikan setidaknya 0,7 persen dari pendapatan nasional mereka sebagai bantuan (Gates dan Hoeffler, 2004).

Norwegia menjadi salah satu negara yang berada di wilayah Nordik, tepatnya di utara Semenanjung Skandinavia. Masyarakat Norwegia memiliki kultur yang erat dengan kemaritiman yang aktif, terlebih sepanjang era Viking. Selama bertahun-tahun, Norwegia menjadi wilayah yang terikat dengan Denmark dan Swedia. Mulai tahun 1905, Norwegia mendapatkan kemerdekaan dari Swedia

melalui referendum. Norwegia sendiri juga menjadi negara netral selama Perang Dunia II, tetapi tetap diduduki oleh penguasa Nazi Jerman selama kurang lebih 5 tahun. Norwegia juga merupakan negara dengan penghasilan nasional yang tinggi melalui sektor swasta. Pada tahun 1960-an, ditemukan minyak dan gas yang berlokasi di lepas pantai yang mana memberikan negara ini dorongan ekonomi serta menjadikan Norwegia sebagai salah satu pengeksport minyak bumi di dunia (NEWS, 2021). Pada tahun 2021, Norwegia menjadi negara dengan indeks produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di antara negara-negara Nordik lainnya (Statista Research Department, 2022).

“*All for Norway*” merupakan sebuah motto atau semboyan yang menyatukan tiga raja modern Norwegia sekaligus juga sebagai seruan bagi bangsa. Sebenarnya, moto kerajaan atau dalam bahasa Norwegia disebut dengan *valgspråk*, sudah menjadi sebuah tradisi lama yang berkembang sejak dahulu. Pertama kali moto kerajaan ini dicetuskan ketika pemerintahan Christian II dari Denmark dan Norwegia. Namun, pihak yang telah berjasa dalam mencetuskan motto tersebut adalah Raja Haakon VII. Raja Haakon VII juga menjadi representasi monarki konstitusional Norwegia dan simbol bangsa dengan mengambil moto *Alt for Norge*. Selain itu, motto ini juga menjadi lambang perlawanan terhadap pendudukan Jerman di Norwegia. Raja Haakon VII sendiri merupakan seorang raja populer yang memimpin Norwegia selama Perang Dunia II. Walaupun Raja Haakon VII dan Keluarga Kerajaan terpaksa meninggalkan Norwegia karena takut akan ancaman terhadap kehidupan mereka, Raja Haakon VII tetap menjadi sebuah simbol penting yang merepresentasikan keinginan

rakyat Norwegia untuk memperjuangkan kebebasan negaranya. Setelah kematian Raja Haakon VII pada tahun 1957, putranya yang bernama Olav menggantikan posisinya sebagai raja dengan masih menerapkan motto yang sama yaitu *All for Norway*. Oleh karena itu, tak Olav menjadi raja yang banyak memberikan kontribusi terhadap kehidupan rakyatnya dan mendapatkan gelar “*Folkekongen*” atau Raja Rakyat. *All for Norway* terus menjadi motto dari Norwegia sampai saat ini pada masa pemerintahan Raja Harald yang mana ia juga merupakan raja asli dari Norwegia setelah menjadi negara yang merdeka dari Swedia (Ilse, 2021).

Melihat dari sejarah mengenai motto “*All for Norway*” milik Kerajaan Norwegia, motto tersebut memiliki arti sebagai sebuah lambang perjuangan Norwegia untuk mendapatkan kebebasan negaranya. Hal ini juga memiliki arti bahwa apa yang Kerajaan Norwegia lakukan, didasarkan demi kepentingan negara dan rakyatnya. Namun, terdapat kontradiksi antara apa yang dilakukan oleh Norwegia dengan arti dari motto kerajaan tersebut. Norwegia sering memberikan bantuan luar negeri terhadap negara lain, terlebih negara yang miskin dan berkembang. Menurut laman <https://donortracker.org>, Norwegia menjadi negara peringkat ke-9 sebagai negara pendonor dengan total bantuan sebesar USD 4,2 miliar pada tahun 2020 (OECD, 2023).

Perlu diketahui, Norwegia merupakan negara yang jarang terekognisi jika dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia tetangganya (Popa, 2015). Swedia memiliki IKEA sebagai *icon* yang membuatnya dikenal oleh dunia internasional. Denmark memiliki tim nasional sepakbola yang kondang di kancah internasional. Bercermin dari situasi tersebut, kondisi Norwegia sangat kontras

dengan negara-negara Skandinavia tetangganya. Norwegia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang terbatas, baik dari segi jumlah penduduk maupun kekuatan ekonomi (Popa, 2015). Selain itu, Norwegia juga tidak memiliki *icon* apapun yang mampu mendongkrak eksistensinya di dunia internasional sehingga Norwegia dirasa perlu menempuh cara-cara tertentu untuk menunjukkan eksistensi dan perannya di kancah internasional (Popa, 2015). Bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, *status-seeking* digunakan sebagai cara merubah citra atau *re-branding* peran di kancah internasional. Namun, masalah utama yang dimiliki oleh Norwegia adalah ketidatampakan peran di kancah internasional. Norwegia selalu terlihat kurang memiliki identitas yang jelas dan diakui secara luas. Jika memang ada, kesan yang ditimbulkan pada Norwegia sebagian besar hanya beranggapan bahwa negara tersebut memiliki citra yang netral (Popa, 2015)

Ada sejumlah faktor yang melanggengkan ketidaktampakan identitas Norwegia tersebut, yaitu: jumlah penduduk; ekonomi serta letak geografis yang kecil. Norwegia menjadi negara yang terisolasi secara politik, geografis dan budaya. Selain itu yang terpenting, Norwegia tidak memiliki merek atau ikon serta kemiripan dengan negara Skandinavia yang menyebabkan tidak adanya faktor pembeda dengan negara Skandinavia lainnya (Government of Norway, 2023).

Berangkat dari masalah tersebut, dimana Norwegia memiliki moto *Alt for Norge* yang berarti semua dilakukan untuk Norwegia dan demi kepentingan Norwegia, tetapi mengapa justru tindakan yang dilakukan oleh Norwegia terkesan kontradiktif. Norwegia dengan murah hati memberikan bantuan kepada negara-

negara mitra, terlebih negara miskin dan berkembang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai apakah tindakan Norwegia dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap negara lain, sesuai dengan makna moto *All for Norway?* Fokus periode pada penelitian ini adalah tahun 2014-2016 yang mana terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap target domestik pemberian bantuan luar negeri.

1.2. Rumusah Masalah

Apakah tindakan Norwegia yang sering memberikan bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang sesuai dengan makna semboyan “*All for Norway*”?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis merumuskan pertanyaan tersebut yaitu untuk memberikan penjelasan apakah sikap Norwegia yang sering memberikan bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang sesuai dengan makna semboyan “*All for Norway*” dan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Norwegia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa Hubungan Internasional, terlebih pada studi mengenai negara-negara Nordik dan dinamika politiknya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai Norwegia terhadap masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini walaupun belum ada penelitian spesifik yang membahas mengenai kesesuaian antara makna semboyan *All for Norway* dengan sikap Norwegia yang kerap memberikan bantuan luar negeri kepada negara miskin dan berkembang. Sebuah jurnal berjudul *How to be a 'front-runner': Norway and international climate politics* yang ditulis oleh Bård Lahn dan Elana Wilson Rowe pada tahun 2015. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana Norwegia sebagai sebuah negara kecil mencari status dalam iklim politik internasional. Norwegia menerapkan berbagai strategi dalam mencari status tersebut. Status Norwegia sebagai negara kecil dengan peran yang besar dalam iklim politik internasional dicapai melalui beberapa peran sekunder dalam iklim politik internasional yang hasilnya Norwegia mendapatkan kesempatan untuk bersanding dengan negara-negara besar dalam forum internasional. Sebagai contohh yaitu COP 15 di Kopenhagen atau perundingan yang dilakukan oleh UNFCCC. Oleh karena itu, usaha Norwegia dalam mencari status dalam iklim politik internasional terbilang efektif melihat ukuran negara yang kecil.

Somewhere between small and middle: Norway in status transition, merupakan *master thesis* yang ditulis oleh Pål Røren pada 2015. *Master thesis* ini membahas mengenai posisi Norwegia sebagai sebuah negara kecil, tetapi dengan adanya beberapa aspek seperti fokus dalam kerja sama multilateral, diplomasi,

hukum internasional dan promosi perdamaian menunjukkan bahwa identitas Norwegia lebih dari sekadar negara kecil. Perilaku Norwegia sebagai keluaran otoritas moral, sudah setara dengan perilaku negara-negara menengah yang sudah mapan. Namun, terdapat rendahnya pengakuan terhadap Norwegia sehingga hal tersebut menjadi konsekuensi langsung dari rendahnya kedudukan historis.

Selain itu, terdapat jurnal lain yang dapat menjadi acuan dari penelitian ini yaitu *Norwegian Development Aid: A Paradigm Shift in the Making* yang ditulis oleh Elling Tjønneland pada tahun 2022 membahas mengenai perubahan yang terjadi dalam kebijakan pembangunan Norwegia sejak tahun 1990 dimana terdapat perluasan fokus pemberian bantuan luar negeri. Jurnal ini menyatakan bahwa hasil dari interaksi antara kekuatan yang mendorong perubahan ini adalah beragamnya fokus bantuan dan terfragmentasi sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai kepentingan serta prioritas yang berbeda. Selain itu, jurnal ini juga mengatakan bahwa perubahan yang paling nyata dapat terlihat dalam peningkatan alokasi anggaran untuk tujuan global ataupun pengurangan anggaran bantuan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori konstruktivisme identitas berbasis peran. Konstruktivisme sebenarnya bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah paradigma yang memiliki asumsi bahwa segala realitas sosial, salah satunya yakni hubungan internasional, tidak ditentukan oleh faktor-faktor material, melainkan faktor tak kasat mata (Rosyidin, 2020). Teori konstruktivisme sendiri muncul sejak berakhirnya Perang Dingin akibat dari gagalnya teori-teori tradisional seperti realisme dan liberalisme. Kegagalan ini tidak terlepas dari keyakinan

bahwa negara aktor yang mementingkan diri sendiri untuk bersaing dalam rangka mendapatkan kekuasaan di antara negara-negara di dunia. Konstruktivisme muncul sebagai sebuah teori pembelajaran kontemporer. Konstruktivisme menjelaskan bahwa dunia sosial dibentuk oleh manusia (Onuf, 1989). Aktor akan terus menerus membentuk sifat dasar hubungan internasional melalui tindakan dan interaksi yang mereka lakukan. Konstruktivisme melihat dunia sebagai sebuah hasil dari konstruksi sosial. Pandangan ini mengacu terhadap hakikat realitas dan hakikat pengetahuan yang biasa dikenal sebagai ontologi dan epistemologi. Realitas dalam konstruktivis selalu membuka prospek perubahan yang mana menjadi suatu realitas tidak bersifat tetapi, tetapi dapat berubah seiring berjalannya waktu serta bergantung pada ide dan keyakinan yang dimiliki oleh para aktor. Selain itu, konstruktivisme juga berpendapat bahwa agensi dan struktur saling berkaitan, di mana struktur memengaruhi agensi dan agensi juga memengaruhi struktur.

Secara garis besar, konstruktivisme pecah menjadi dua aliran, yaitu aliran moderat atau modernis atau konvensional dan aliran kritis. Aliran moderat atau modernis memiliki karakter yang condong ke arah epistemologi positivis dengan menerapkan standar metodologis yang rigid dan ilmiah sehingga fokus aliran ini adalah untuk mencari hubungan sebab akibat dengan tujuan menjelaskan suatu fenomena. Sementara itu aliran kedua yaitu konstruktivisme kritis yang mana terinspirasi dari filsafat posmodernisme sehingga fokus aliran ini adalah sebagai sebuah proses konstruksi suatu gagasan dan bukan sekadar mencari hubungan sebab akibat (Rosyidin, 2020). Dalam konstruktivisme terdapat tiga konsep utama

yang memiliki pengaruh terhadap dinamika hubungan internasional, yaitu identitas, norma, dan bahasa (Wendt, 1999). Pada penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran konstruktivisme modernis, secara lebih spesifik konstruktivis yang menekankan pada konsep identitas.

Dalam membentuk sebuah identitas, perlu adanya proses yang disebut interaksionisme simbolik milik Herbert Blumer (Burchill, 2005). Proses ini menggambarkan perilaku aktor terhadap suatu objek terjadi berdasarkan pengertian yang terbentuk atas objek tersebut. Dengan kata lain, identitas terbentuk apabila aktor saling berinteraksi dengan aktor lainnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan Hopf yaitu:

Identities perform three necessary functions in a society: they tell you and others who you are and they tell you who others are. In telling you who you are, identities strongly imply a particular set of interest or preferences with respect to choices of action in particular domains, and with respect to particular actors. The identity of a state implies its preferences and consequent actions (Hopf, 1998)

Konstruktivisme berbasis identitas menggunakan konsep identitas untuk menjelaskan fenomena internasional. Dalam konstruktivisme identitas sama pentingnya dengan konsep ‘kekuasaan’ dalam realisme maupun ‘institusi internasional’ dalam liberalisme (Rosyidin, 2015). Identitas juga menjadi variabel independen ataupun dependen yang menjelaskan tindakan suatu negara. Lebih lanjut, identitas merupakan sebuah variabel yang tidak dapat terlepas dari sejarah, budaya, politik dan sosial suatu negara (Hopf, 1998). Identitas sendiri terkonstruksi secara sosial yang mana merupakan hasil dari struktur sosial intersubjektif atas sistem norma, kepercayaan, ide serta nilai yang terinstitusionalisasi dari lingkungan sosial (Burchill, 2005).

Selain itu, aliran ini juga menggunakan negara sebagai inti yang mana negara adalah aktor internasional yang paling penting. Alexander Wendt menjelaskan bahwa identitas merupakan atribut yang melekat pada diri aktor hubungan internasional yang mendorong suatu tindakan (Wendt, 1994). Dari pendapat Wendt tersebut, identitas dapat membentuk kepentingan aktor, terlebih negara, yang selanjutnya kepentingan tersebut membentuk tindakan yang secara tidak langsung juga membentuk identitas, baik yang sama seperti sebelumnya maupun identitas yang baru (Wendt, 1994). Konsep identitas dapat dipahami melalui dua pemaknaan, yaitu identitas sebagai kategori sosial dan personal. Dalam identitas sebagai kategori sosial, konstruktivisme mengimplikasikan identitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi di dalam proses interaksi dengan pihak lain sehingga diperlukan subjektivitas dalam pengimplimentasiannya. Sementara itu, identitas sebagai kategori personal menjadikan identitas sebagai sebuah karakteristik yang melekat dalam diri aktor sehingga tidak memerlukan suatu pembeda. Dengan kata lain, identitas sebagai kategori personal memandang aktor sebagai pribadi yang unik.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri menurut K. J. Holsti (1977) merupakan pengiriman dana, barang ataupun bantuan teknis lainnya dari negara donor kepada negara penerima sebagai sebuah instrumen kebijakan dalam dinamika hubungan internasional (Holsti, 1977). Selain itu, bantuan luar

merupakan transfer modal dalam bentuk barang atau jasa dari suatu negara atau organisasi internasional dalam rangka memberikan bantuan guna memenuhi kepentingan negara ataupun penduduk negara penerima tersebut.

1.6.1.2. *Motto*

Motto merupakan sebuah kalimat atau frasa pendek yang menjadi suatu pedoman perilaku bagi seseorang ataupun kelompok. Dalam konteks penelitian ini adalah pedoman yang digunakan oleh Kerajaan Norwegia.

1.6.1.3. *All for Norway*

All for Norway merupakan motto yang dimiliki oleh Kerajaan Norwegia dan dicetuskan oleh Raja Haakon VII ketika melakukan pembebasan dari penjajahan Jerman. *All for Norway* berarti semua yang dilakukan oleh kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Bantuan Luar Negeri*

Bantuan luar negeri dalam penelitian ini digunakan sebagai alat kepentingan yang digunakan Norwegia untuk mendongkrak eksistensinya di kancah internasional karena tidak adanya *icon* yang dimiliki Norwegia apabila dibandingkan negara Skandinavia lainnya. Bentuk dari bantuan luar negeri yang dimaksud yaitu berupa pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi hijau dan perlindungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

1.6.2.2. *Motto*

Motto dalam penelitian ini yaitu *All for Norway* yang menjadi lambang pemerintahan dari Kerajaan Norwegia.

1.6.2.3. *All for Norway*

All for Norway merupakan motto kerajaan yang dimiliki oleh Norwegia dan pertama kali diinisiasi oleh Raja Haakon VII. *All for Norway* digunakan sebagai sebuah simbol perlawanan yang digunakan Kerajaan Norwegia terhadap pendudukan Jerman serta simbol mengenai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia itu demi kepentingan rakyatnya.

1.7. Argumen Penelitian

Sikap Norwegia yang memberikan bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang didasari oleh keinginan Norwegia untuk memiliki peran yang menonjol dalam dinamika internasional. Hal ini didasari karena Norwegia tidak memiliki identitas yang menonjol dibandingkan dengan negara Skandinavia lainnya. Apabila dikaitkan dengan konstruktivisme berbasis identitas, sikap Norwegia dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang ini adalah untuk membuktikan bahwa Norwegia memiliki identitas sebagai sebuah negara donor dengan fokus bantuan kepada kemanusiaan dan perubahan iklim. Sasaran bantuan luar negeri Norwegia yaitu terhadap negara miskin dan berkembang. Aksi yang dilakukan oleh Norwegia untuk memberikan bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang ini sesuai dengan makna semboyan *All for Norway* karena apa yang dilakukan oleh Norwegia

dilakukan guna memenuhi kepentingan negara tersebut melalui citra yang baik sebagai sebuah negara donor dalam dinamika hubungan internasional.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pemahaman yang bersifat subjektif dan didukung dengan fakta serta realita di lapangan. Hal ini tentu saja akan bersinggungan dengan dinamika masyarakat, sejarah, serta dinamika sosial lainnya (Creswell, 1998).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang memiliki tujuan untuk mencari tahu sebab akibat dibalik suatu fenomena yang terjadi. Fokus dari penelitian ini adalah analisis hubungan-hubungan antara variabel (Singarimbun, 1981). Sebagai sebuah penelitian yang bersifat eksplanatif, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai mengapa perilaku Norwegia kontradiktif dengan national branding “*All for Norway*” yang mana Norwegia justru aktif memberi bantuan luar negeri kepada negara lain.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat tinggal penulis, yakni di Ungaran dan di sekitar Universitas Diponegoro.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Norwegia serta dinamikanya dalam pemberian bantuan luar negeri terhadap negara miskin dan berkembang. Secara lebih spesifik, subjek penelitian ini adalah pemerintah Norwegia.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang telah ada sebelumnya (Danang Sunyoto, 2013).

1.8.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data meliputi : studi kepustakaan (*Library Research*) dan metode berbasis internet. Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur serta laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir,1998). Metode berbasis internet sendiri adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan jaringan internet. Hasil yang didapat berasal dari jurnal-jurnal umum, website ilmiah, website negara ataupun sumber dari internet yang kredibilitasnya sudah terbukti. Teknik ini sesuai dengan era globalisasi yang semakin menerapkan dunia digital.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kongruen. Teknik ini berfokus pada variabel independen dan variabel penjelas dari teori tersebut sebagai filter data (Rosyid, 2019). Selain itu, teknik ini juga menggunakan beberapa asumsi dasar untuk dicocokkan dengan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini.